

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesia Stock Exchange* (IDX) merupakan lembaga resmi yang memfasilitasi kegiatan perdagangan efek dan penawaran umum di pasar modal yang setiap kegiatannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal Indonesia. Sejak 25 Januari 2021, BEI menerapkan klasifikasi baru terkait sektor industri yaitu *Indonesia stock Exchange Industrial Classification* atau IDX-IC yang memperbarui *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) yang telah digunakan sejak 1996. IDX-IC mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan eksposur pasar sejenis untuk memudahkan investor menganalisis secara lebih akurat dan detail. BEI melalui IDX-IC mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan 4 tingkat yang terdiri dari 12 sektor, 35 sub-sektor, 69 industri, 130 sub-industri. 12 sektor tersebut adalah energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, kesehatan, keuangan, properti dan real estat, teknologi, infrastruktur dan transportasi dan logistik (BEI, 2021).

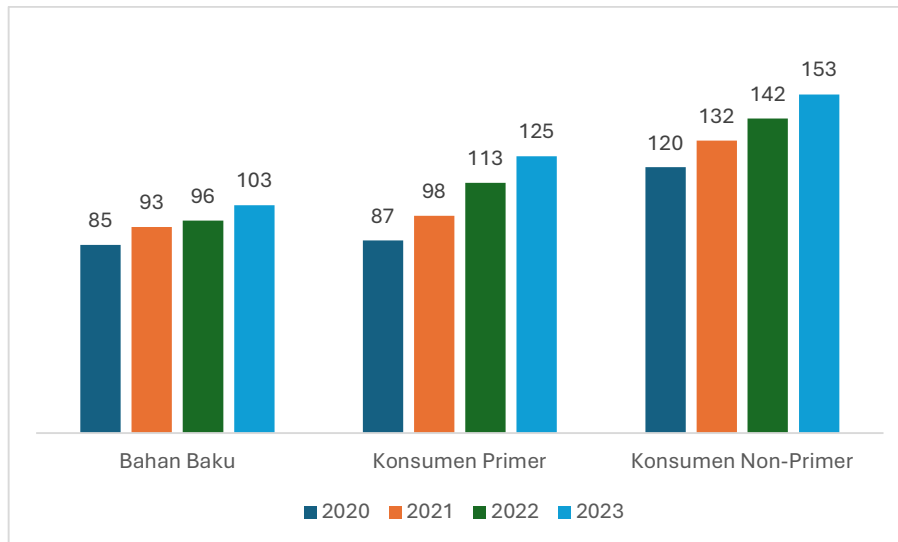
Menurut BEI, sektor barang baku adalah sektor perusahaan yang bergerak dalam produksi dan distribusi bahan baku dasar yang akan digunakan dalam proses manufaktur dan konstruksi. Sektor bahan baku menghasilkan barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral non-energi, dan produksi kayu dan kertas (BEI, 2021). Sektor konsumen primer adalah sektor yang terdiri dari perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan produk dan jasa yang bersifat anti-siklis atau kebutuhan utama. Sektor ini memproduksi barang dan jasa kebutuhan primer, makanan dan minuman kemasan, obat-obatan, produk pertanian, rokok, dan barang keperluan rumah tangga (Taufiqurrahman & Hidayati, 2022). Sedangkan, sektor konsumen non-primer adalah sektor perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang dijual kepada konsumen yang barangnya bersifat siklis atau sekunder, sehingga permintaan terhadap barang tersebut selaras dengan pertumbuhan

ekonomi. Sektor ini mencakup produksi kendaraan dan bagiannya, barang rumah tangga tahan lama, pakaian, Sepatu, barang tekstil, barang olahraga dan hobi, pariwisata, rekreasi, pendidikan, layanan konsumen, perusahaan media dan periklanan, dan lain sebagainya (Meiliani, F., Djazuli. A., & Utami, 2024). Ketiga sektor tersebut saling terkait dalam rantai ekonomi, karena sektor bahan baku menjadi fondasi utama sebagai pemasok sumber daya untuk kegiatan produksi sektor konsumen primer dan konsumen non-primer.

Sektor bahan baku berperan penting dalam pengembangan industri, karena menyediakan material dasar yang diperlukan untuk berbagai proses produksi di sektor lain. Industri yang bergerak dalam pengelolaan bahan baku berfungsi sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi global, dengan memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan material yang dibutuhkan dalam rantai pasok global (Nwaila et al., 2024). Di Indonesia, sektor industri yang didalamnya termasuk industri bahan baku, memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 19,86% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Hal tersebut dapat menarik minat investor, yang terlihat dari pencapaian investasi di sektor manufaktur Indonesia. Dari bulan Januari hingga September tahun 2021, investasi yang terealisasi di sektor manufaktur mencapai Rp236,79 triliun, mengalami kenaikan sebesar 17,3% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp201,87 triliun (Kementerian Perindustrian RI, 2021).

Selain sektor bahan baku, sektor konsumen non primer juga menjadi sorotan utama. Berdasarkan berita dari Saputri et al. (2024) penguatan IHSG sekitar 0,74% dipengaruhi oleh beberapa sektor, namun sektor yang mengalami peningkatan paling besar dialami oleh sektor konsumen non-primer sebesar 2,76%, yang dari persentase tersebut mencerminkan kuatnya permintaan terhadap produk di luar kebutuhan dasar. Hal tersebut menunjukkan konsumsi masyarakat Indonesia sedang berada dalam tren positif yang menjadi optimisme investor terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Konsumen primer juga menjadi pilihan lain bagi para investor. Saat tengah terjadi inflasi masyarakat akan cenderung fokus pada pemenuhan

kebutuhan sehari-hari atau yang bersifat primer. Hal ini sesuai dengan sifat anti-siklis barang konsumen primer yang tidak terpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung oleh survei yang dilakukan Bank Indonesia (BI) yang dilakukan bulan September 2022 bahwa pendapatan konsumen untuk konsumsi meningkat menjadi 74,8% dari 73,6% (*Kompas.Id*, 2022).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Perusahaan Sektor, Sektor Konsumen Primer, Sektor Konsumen Non Primer, dan Sektor Bahan Baku yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2023

Sumber: idx.co.id yang telah diolah penulis (2024)

Gambar 1.1 merupakan pertumbuhan perusahaan sektor bahan baku, sektor konsumen primer, dan sektor konsumen non primer yang terdaftar di BEI selama periode 2020-2023. Pertumbuhan perusahaan ketiga sektor mengalami peningkatan dengan konsumen primer berada pada urutan pertama dengan total pertumbuhan sebanyak 37 perusahaan selama kurun waktu 2020 ke 2023, yang kemudian perusahaan konsumen non-primer urutan kedua dengan pertumbuhan sebanyak 33 perusahaan, dilanjutkan sektor sektor bahan baku sebanyak 18 perusahaan. Alasan persebaran sektor tersebut menjadi perusahaan publik karena adanya sumber daya yang besar dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Sektor konsumen primer, konsumen non-primer, dan bahan baku memiliki hubungan dalam rantai

produksi dan konsumsi, di mana sektor bahan baku berperan sebagai penyedia utama material bagi sektor konsumen primer dan konsumen non primer yang kemudian menghasilkan produk. Sektor bahan baku seperti pertambangan dan kehutanan menyediakan bahan dasar seperti logam, kayu, dan kertas yang digunakan dalam produksi barang konsumsi primer seperti makanan dalam kemasan dan produk kebutuhan sehari-hari, serta barang konsumsi non-primer seperti elektronik, otomotif, dan tekstil. Ketiga sektor ini saling berkaitan dalam menciptakan nilai ekonomi.

Di sisi lain, distribusi perusahaan di sektor bahan baku, konsumen primer, dan konsumen non-primer berkontribusi signifikan terhadap produksi limbah industri yang berdampak negatif pada lingkungan. Sektor industri pengolahan, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2023, juga menjadi salah satu penghasil limbah terbesar. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sekitar 60 juta ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dihasilkan setiap tahun dari sektor industri manufaktur. Limbah ini dapat mencemari tanah, air, dan udara jika tidak dikelola dengan baik, menyebabkan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Selain itu, sektor bahan baku seperti industri semen dan pulp menghasilkan limbah padat dalam jumlah besar sementara sektor konsumen primer seperti industri makanan berkontribusi terhadap limbah organik dan plastik yang sulit terurai.

Sektor konsumen non-primer, termasuk industri elektronik dan tekstil, juga menyumbang limbah dalam jumlah besar. Limbah elektronik mengandung logam berat seperti merkuri dan timbal yang berbahaya bagi lingkungan jika tidak didaur ulang dengan benar. Sementara itu, industri tekstil menghasilkan limbah cair yang mengandung zat pewarna dan bahan kimia beracun yang mencemari sumber air. Berdasarkan data dari *Climate Tracker Asia*, sektor limbah industri sering kali luput dari perhatian meskipun memberikan kontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penelitian terhadap sektor bahan baku, konsumen primer, dan konsumen non-primer menjadi penting dalam mengidentifikasi solusi

pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Sustainable development digambarkan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Di Indonesia, upaya keberlanjutan telah dilakukan semua pihak terkait, agar tercapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi *Sustainability Development Goals* (SDGs), Indonesia ikut mengintegrasikan 17 tujuan tersebut ke dalam agenda pembangunan nasional. Menurut Rahmanitya & Ardiansyah (2023) berdasarkan inisiatif *Just Energy Transition Partnership* (JETP) Indonesia berkomitmen untuk beralih ke energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk sektor kehutanan dan perikanan, menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak negative terhadap lingkungan (Djibran et al., 2023). Pembangunan yang inklusif juga menjadi prioritas, dengan upaya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang terpinggirkan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia (Hapsoro & Bangun, 2020). Maka dari itu dibutuhkan kolaborasi antara semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia yang mana harus di capai pada tahun 2030.

Pemerintah telah mengatur tentang pelaksanaan SDGs di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden no. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang mencakup berbagai tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan secara partisipatif (Natalia & Maulidya, 2023). Dengan adanya aturan presiden tersebut, Indonesia optimis dapat mencapai target SDGs pada tahun 2030 nanti. Hal ini sesuai dengan capaian Indonesia selama 5 tahun belakang, yang mana peringkat Indonesia dalam pencapaian SDGs naik dari yang awalnya peringkat 102 pada tahun 2019 menjadi peringkat 75 pada tahun 2023, yang mana sebesar 76 persen

indikator SDGs di Indonesia telah tercapai (Ministry of National Development Planning / National Development Planning Agency (Bappenas), 2021). Namun, dari 76 persen indikator yang tercapai tadi, sebesar 36 persen dinyatakan sebagai target yang mengalami progres terbatas, dan sisanya 24 persen dinyatakan sebagai target SDGs yang menunjukkan status buruk, yang mana target SDGs dengan status buruk dianggap target stagnan. Beberapa tujuan keberlanjutan stagnan yaitu, Tujuan 2 – Tanpa Kelaparan, Tujuan 7 – Energi Bersih dan Terjangkau, Tujuan 11 – Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan, dan Tujuan 13 – Penanganan Perubahan Iklim (Pristiandaru, 2024). Hal ini dikarenakan beberapa indikator mengalami penurunan atau kemunduran dibandingkan periode sebelumnya, mengingat tahun 2024 skor capaian SDGs Indonesia mengalami penurunan menjadi 69,4 poin dari yang 70,16 poin.

Dalam memahami aktivitas perusahaan dan keberlanjutan penelitian ini menggunakan teori stakeholder sebagai *grand theory*. Teori stakeholder menekankan bahwa keberlanjutan bisnis tidak hanya bergantung pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga pada kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan (Richieta & Muslih, 2022). Konsep ini sejalan dengan prinsip *sustainable development*, yang menuntut keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial (Lubis & Aristantya, 2024). Penerapan teori stakeholder, perusahaan dapat mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnis mereka, sehingga tidak hanya berfokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi berbagai pihak (Abdullah & Amiruddin, 2020). Pendekatan ini juga mendorong perusahaan untuk lebih transparan, berinovasi dalam praktik bisnis berkelanjutan, serta membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan. Teori stakeholder menjadi dasar penting dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, di mana keterlibatan aktif berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan jangka panjang (Saputri et al., 2024).

Konsep *sustainable development* merupakan konsep yang menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan dan kesetaraan sosial (Suparmoko, 2020). Hal ini sesuai juga dengan konsep *triple bottom line* yang menjelaskan bahwa *sustainability* tidak hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan manusia. *Triple bottom line* memiliki 3 komponen utama yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi menekankan keuntungan untuk keberlanjutan perusahaan, sementara aspek sosial mengharuskan perusahaan berkontribusi bagi masyarakat. Aspek lingkungan menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dalam operasional bisnis. Kombinasi ekonomi dan sosial menciptakan keseimbangan sosial, sosial dan lingkungan menghasilkan lingkungan yang layak, sedangkan lingkungan dan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika ketiganya terintegrasi, maka akan tercapai *sustainable development* bagi perusahaan (Yanti & Rasmini, 2015).

Sustainable development bertumpu pada tiga pilar yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang ketiganya harus berkembang seimbang (Pertiwi, 2021:10). Pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi guna mencapai kesejahteraan. Kenaikan pendapatan dari pembangunan ekonomi akan mendukung pemeliharaan lingkungan untuk kelestarian alam, sementara lingkungan yang terjaga akan mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya guna mencapai kesejahteraan (Suparmoko, 2020). Dengan itu, *sustainable development* membantu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup (Afidah et al., 2022).

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai *sustainable development* yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan (Sugandi et al., 2022). Faktor pertama adalah ekonomi. Dalam mencapai *sustainable development* dalam aspek ekonomi, masyarakat harus mencari cara

untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang, tanpa menghabiskan sumber daya alam. Terdapat tiga elemen yang mendukung *sustainability* ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, pemerataan dan distribusi kemakmuran (Suparmoko, 2020). Aspek ekonomi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup tujuan ke 7 menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, tujuan ke 8 meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, tujuan ke 9 pembangunan infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, tujuan ke 10 mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, dan tujuan ke 17 menguatkan sarana pelaksanaan dan merevetalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Handrian & Andry, 2020).

Sektor konsumen non primer merupakan sektor mencakup industri yang memproduksi barang dan jasa yang bersifat esensial (F. Fitriyani et al., 2022). Sektor konsumen non primer lebih sering menggunakan tenaga kerja kontrak atau *outsourcing* karena permintaan barang atau jasa biasanya mengikuti pertumbuhan ekonomi, hal itu berdampak pada upah dan status kerja yang bisa tiba-tiba terkena pemutusan hubungan kerja saat permintaan dari konsumen menurun (Izzati, 2021). Salah satunya dialami oleh buruh PT Theodore Pan Garmino yang merupakan anak perusahaan PT Pan Brothers Tbk. Menurut pemberitaan dari Pasar Dana yang ditulis oleh Aziz (2023), Buruh PT Theodore Pan Garmino melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Tasikmalaya, terkait gaji bulan September 2023 yang sampai 10 Oktober 2023 belum dibayarkan oleh pihak PT Theodore Pan Garmino. Pembayaran upah buruh yang tertunda dikabarkan karena ada permasalahan internal yang terjadi antara pemegang saham PT Theodore Pan Garmino. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian keberlangsungan pekerjaan bagi para buruh untuk bulan Oktober dan seterusnya, karena ada beberapa buruh yang dilarang masuk bekerja. Permasalahan ini berawal dari penutupan akses ekspor dan pengiriman barang produksi kepada perusahaan pemberi order, serta enggan menyelesaikan persoalan melalui rapat direksi atau rapat umum pemegang saham. Tindakan ini menyebabkan gangguan operasional, sehingga ribuan pekerja

khawatir akan nasib mereka akibat terhentinya operasional pabrik. Selain itu, pemberitaan lain dari Trimurti.id yang ditulis oleh Trimurti (2024) terkait PT Theodore Pan Garmino yang belum membayar Tunjangan Hari Raya (THR), tunggakan Upah dan upah lembur. Hal tersebut membuat buruh PT Theodore Pan Garmino melakukan demonstrasi pada 22 April 2024. Selain itu selama covid-19, perusahaan melakukan jam kerja panjang, termasuk jam kerja tambahan yang tidak dianggap sebagai lembur dan upah tidak dibayar sesuai ketentuan. Upah yang diterima buruh tidak pernah mencapai Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi, dan tahun ini upah dibayarkan secara dicicil. Selain itu, buruh sering diminta bekerja pada Sabtu dan Minggu tanpa kompensasi lembur, serta menghadapi perlakuan tidak menyenangkan seperti bentakan dan makian (Aziz, 2023; Trimurti, 2024).

Permasalahan yang terjadi di PT Theodore Pan Garmino ini berhubungan dengan SDG 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Keterlambatan pembayaran upah, THR, dan pelanggaran hak pekerja lainnya bertentangan dengan prinsip pekerjaan yang layak dan hak atas pendapatan yang adil (Chigbu & Nekhwevha, 2023). Selain itu kasus ini juga berkaitan dengan SDG 10, yang menekankan pada pengurangan ketimpangan, termasuk ketimpangan ekonomi dan sosial yang terjadi di lingkungan kerja. Pemerintah RI (2021) sudah mengeluarkan peraturan terkait upah buruh, antara lain Pasal 89 ayat (1): mengatur tentang pengupahan yang harus sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, pasal 3 ayat (1): menyatakan bahwa pemberi kerja wajib memberikan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Pasal 5 ayat (4): mengatur bahwa THR harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan Pasal 55: menegaskan bahwa pengusaha wajib membayar upah tepat waktu dan sesuai perjanjian kerja (Menteri Ketenagakerjaan, 2016; Pemerintah RI, 2015). Dengan adanya pemberitaan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Theodore Pan Garmino yang dapat menghambat kontribusi perusahaan terhadap

pencapaian SDGs, terutama dalam hal pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Faktor yang kedua adalah sosial. Aspek sosial dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup tujuan - 1 mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun, tujuan - 2 menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan, tujuan - 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk semua usia, tujuan - 4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, dan tujuan - 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan (Patiung, 2019).

Perusahaan sektor bahan baku khususnya pertambangan selalu membawa dua sisi, sisi baik berupa meningkatkan kemakmuran ekonomi dan sisi buruknya menimbulkan dampak lingkungan yang dalam pemulihannya memerlukan tenaga, dan biaya yang tinggi (Marganingrum & Noviardi, 2020). Dampak utama dari aktivitas pertambangan adalah pencemaran air, dengan menyebabkan turunnya kualitas air disekitar wilayah pertambangan akibat kandungan air limbah tambang yang mengandung logam berat (Nurfatimah, 2023). Salah satu kasus terjadi di Maluku Utara terdapat beberapa perusahaan tambang nikel yang beroperasi, salah satunya PT Trimegah Bangun Persada Tbk yang merupakan bagian dari Harita Group. Diberitakan oleh Tirtastory.id yang ditulis oleh Bhawono (2023) aktivitas operasional dari PT Trimegah Bangun Persada Tbk. menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif terhadap masyarakat adat di wilayah tersebut.

Hal ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari operasi tambang, seperti limbah tambang yang mencemari sumber air bersih. Air yang dulunya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti minum, memasak, dan mencuci, kini tercemar oleh bahan kimia berbahaya dan logam berat dari limbah tambang nikel. Sumber-sumber air tradisional, seperti sumur, sungai, dan mata air, tidak lagi aman digunakan. Akibatnya, banyak masyarakat yang terpaksa menggunakan air tercemar karena tidak memiliki akses ke sumber air bersih

alternatif. Hal tersebut menyebabkan diare pada masyarakat akibat mengonsumsi air yang tidak layak ini. Penyakit tersebut menyerang baik orang dewasa maupun anak-anak, dengan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya akses terhadap fasilitas kesehatan yang memadai di daerah tersebut. Dengan pengobatan yang terbatas, kasus diare sering kali menjadi lebih parah dan berisiko menyebabkan dehidrasi berat atau komplikasi kesehatan lainnya. Selain itu, kurangnya perhatian dari pihak berwenang terhadap kondisi sanitasi dan dampak lingkungan dari tambang nikel turut memperburuk situasi ini. Masyarakat setempat juga menghadapi kesulitan dalam mendapatkan bantuan, baik berupa perbaikan infrastruktur air bersih maupun layanan kesehatan darurat, sehingga masalah ini terus berlanjut tanpa solusi yang memadai. Selain itu dari permasalahan ini juga menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, yang kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi bagian integral dari kehidupan dan budaya mereka. Banyak masyarakat lokal yang bergantung pada pertanian, perikanan, dan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan rusaknya lingkungan akibat operasi tambang, mata pencaharian ini menjadi sulit untuk dilanjutkan (Bhawono, 2023).

Kasus yang terjadi di Maluku Utara tersebut bertentangan dengan tujuan SDGs 3 menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk semua usia (Utara, 2020). Diare yang terjadi sering kali berkaitan dengan buruknya kualitas air, termasuk limbah tambang nikel yang mencemari sumber air bersih warga sekitar pemukiman. Pencemaran tersebut mengurangi akses masyarakat terhadap air yang layak konsumsi. Selain itu limbah tambang yang tidak dikelola dengan benar dapat mencemari air, tanah, dan ekosistem sekitarnya (Nurfatimah, 2023). Hal ini juga melanggar prinsip SDGs 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Perusahaan seharusnya segera mengambil langkah mitigasi untuk mengatasi dampak negatif aktivitas tambang terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat agar tercipta transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku untuk memastikan keberlanjutan operasional yang bertanggung jawab (Sucofindo, 2023). Selain itu, pemerintah juga telah mengatur berbagai regulasi terkait kesehatan, pengelolaan air dan kualitas air

serta pengendalian pencemaran air dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, termasuk akses terhadap air bersih (Pemerintah RI, 2009). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan mengatur pengelolaan sumber daya air untuk menjamin kelestarian dan kualitas air bagi masyarakat (Pemerintah RI, 1974). Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur standar kualitas air untuk berbagai keperluan, termasuk konsumsi, dan mengatur sanksi terhadap pencemaran air (Peraturan Pemerintah RI, 2001).

Faktor ketiga adalah lingkungan. Lingkungan merupakan aspek penting dalam *sustainability* karena lingkungan menyediakan sumber daya alam yang diperlukan untuk kehidupan manusia dan kegiatan ekonomi. Aspek lingkungan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup tujuan ke 6 menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan, tujuan ke 11 menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, tujuan ke 12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, tujuan ke 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, tujuan ke 14 melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, dan tujuan ke 15 melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan (Patiung, 2019).

Perusahaan sektor konsumen primer menjadi salah satu penyumbang besar sampah plastik di Indonesia (Mita Nuraini & Murtanto, 2022). Salah satu kegiatan *brand audit* yang dilakukan komunitas lingkungan *Envigreen Society* dan *Break Free From Plastic* (BFFP), mengungkap bahwa perusahaan sektor konsumen primer menjadi penyumbang utama sampah plastik, khususnya kemasan saset. *Brand audit pertama* dilakukan pada 9 September 2023 di Kawasan Muharto, hasil *brand audit* menunjukkan pencemaran sampah saset didominasi oleh Wings 27.3%, Unilever 21.06%, Indofood 18,4%, Ajinomoto 13,28%, dan Kapal Api Group 6,26% (Kusuma, 2023). Brand audit kedua dilakukan oleh Greenpeace Indonesia, Ecoton, Walhi, Trash Hero Indonesia, dan YPBB dari Oktober 2023 hingga

Februari 2024 di 34 titik lokasi audit dengan saset yang terkumpul sebanyak 9.698. Hasilnya, terdapat 5 produsen pencemar saset terbanyak, yaitu, Wings sebanyak 1251 saset, Salim Group sebanyak 672 saset, Mayora Indah sebanyak 629 saset, Unilever sebanyak 603 saset, PT Santos Jaya Abadi sebanyak 454 saset (Reviyanto, 2024). Plastik sekali pakai dari sektor konsumen primer mencemari lingkungan dan mengancam ekosistem karena sifatnya yang sulit terurai. Pemerintah telah mengatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 mewajibkan produsen bertanggung jawab atas limbah kemasan plastik, namun krisis ini terus berlanjut, berkontribusi pada pencemaran dan perubahan iklim. Selain itu permasalahan ini juga bertentangan dengan tujuan SDGs, seperti tujuan 12 - konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, maka dari itu diperlukan upaya pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang plastik serta inovasi kemasan ramah lingkungan untuk mencapai SDGs 12 (Utara, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai *sustainable development* telah banyak dilakukan, yang dalam mencapai tujuan *sustainability* didukung oleh berbagai faktor internal yang di antaranya yaitu penerapan kebijakan *green accounting* dan *material flow cost accounting* (Hindriani et al., 2024). Berikut merupakan faktor-faktor yang diteliti dalam penelitian ini. Faktor pertama yaitu *green accounting* adalah pendekatan akuntansi yang mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak lingkungannya (Gola et al., 2022). Hal tersebut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan (Nasir et al., 2024). Perusahaan yang menerapkan sistem *green accounting* akan melaporkannya dalam bentuk *sustainability report* (Machain et al., 2021). Laporan tersebut memuat informasi mengenai biaya lingkungan, seperti biaya pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan dan investasi pada teknologi yang lebih ramah lingkungan (Marota, 2024). Selain itu, penerapan *green accounting* dapat mengurangi risiko beban biaya masa depan terkait regulasi lingkungan, sanksi dari pemerintah dan lainnya yang dapat memperburuk keadaan. (Majidah & Aryanty, 2023). Perusahaan yang menerapkan *green accounting* akan mencatat dan melaporkan dampak lingkungan secara terukur dalam *sustainability*

report (Weber & Elalfy, 2024). Dengan demikian, *Sustainability report* yang diterbitkan oleh perusahaan menggambarkan kepeduliannya terhadap lingkungan dan sosial yang mendukung pencapaian tujuan *sustainable development*.

Hal ini sejalan dengan Justita Dura & Riyanto Suharsono (2022), Selpiyanti & Fakhroni (2020), dan Utami & Prasetyo (2024) menemukan bahwa penerapan *green accounting* memiliki pengaruh positif terhadap *sustainable development*. Hal ini menunjukkan semakin tinggi komitmen perusahaan dalam menerapkan *green accounting*, maka semakin besar transparansi dan akuntabilitasnya dalam mencatat serta mengungkapkan dampak lingkungan dari aktivitas operasional. Dengan demikian, penerapan *green accounting* mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan *sustainable development* melalui pengelolaan sumber daya yang efisien, pengurangan limbah, serta peningkatan kesadaran lingkungan dalam strategi bisnis perusahaan. Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Putri et al. (2024) yang menunjukkan bahwa *green accounting* berpengaruh negatif terhadap *sustainable development*. Keadaan ini berarti semakin perusahaan berkomitmen terhadap penerapan *green accounting*, maka semakin menurun atau semakin sedikit tercapainya tujuan keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rachmawati & Karim (2021), hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengungkapan informasi lingkungan oleh perusahaan karena berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran perusahaan karena sifat pengungkapan yang sukarela, dan anggapan bahwa *green accounting* menambah biaya tanpa menghasilkan manfaat langsung bagi perusahaan.

Disamping itu, penelitian Damayanti & Harti Budi Yanti (2023), dan May et al. (2023) menyatakan bahwa *green accounting* tidak berpengaruh terhadap *sustainable development*. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengungkapan informasi terkait lingkungan dan penerapan *green accounting* belum menjadi prioritas utama perusahaan, karena implementasinya memerlukan biaya tambahan yang dianggap dapat mengurangi profitabilitas, sehingga perusahaan cenderung mengabaikan aspek lingkungan demi menjaga keuntungan.

Faktor yang kedua, yaitu *material flow cost accounting*. *Material flow cost accounting* adalah alat akuntansi manajemen lingkungan yang dirancang untuk mengukur efisiensi penggunaan material dalam proses produksi, yang berkontribusi pada pengurangan limbah, emisi dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan (Dahi & Abdullah, 2024). MFCA bekerja dengan memberikan transparansi aliran material dan energi, kemudian mengalokasikan biaya pada produk dan kerugian material. Hal tersebut membuat perusahaan dapat melacak pemborosan dan memudahkan identifikasi serta penanganan inefisiensi sumber daya (Kitada et al., 2022). Dalam penelitian ini, pengaruh MFCA terhadap *sustainability* dilihat dari kemampuan perusahaan dalam meningkatkan efisiensi biaya dan mengelola sumber daya (M. P. Kurniawan et al., 2024).

Penerapan MFCA memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi seluruh aliran material dalam proses produksi, baik yang menghasilkan *output* positif (produk utama) maupun *output* negatif (limbah), sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi potensi penghematan biaya yang akan menghasilkan laba serta mendukung *sustainability* perusahaan (Liu & Yang, 2013). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdullah & Amiruddin (2020), Dahi & Abdullah (2024), dan Maulana et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan MFCA berpengaruh positif terhadap *sustainable development*. Hal ini terjadi karena dengan menerapkan MFCA, perusahaan mampu mengurangi limbah produksi, mengelola biaya secara lebih efisien, dan meningkatkan profitabilitas, yang akan mendukung *sustainability* lingkup ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan kata lain, MFCA memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk tidak hanya mencapai efisiensi biaya tetapi juga memenuhi tanggung jawab lingkungan mereka, sehingga menghasilkan kontribusi yang signifikan terhadap *sustainable development*. Namun terdapat hasil penelitian lain yang dilakukan oleh R. Kurniawan & Fitranita (2024), Noviany Rahmatika et al. (2023), dan Santoso & Handoko (2025) menemukan bahwa MFCA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *sustainable development*. Kondisi ini terjadi karena sebagian perusahaan hanya fokus pada aspek ekonomis dari MFCA, tanpa benar-benar memanfaatkan

hasil analisisnya untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Banyak perusahaan yang enggan mengalokasikan sumber daya tambahan untuk memperbaiki efisiensi material, karena penerapan MFCA sering kali membutuhkan investasi awal yang besar, baik dalam teknologi maupun usia (Rachmawati & Karim, 2021). Selain itu menurut Sulong et al. (2015) penerapan MFCA membutuhkan dukungan strategis dan budaya organisasi yang proaktif terhadap keberlanjutan, tanpa hanya sekadar mengandalkan efisiensi teknis. Tanpa adanya komitmen tersebut, MFCA hanya akan menjadi alat administratif tanpa dampak nyata pada pembangunan berkelanjutan. Selain itu penelitian Ulupui et al., (2020) menunjukkan bahwa penerapan MFCA dapat berpengaruh negatif terhadap *sustainable development* apabila perusahaan lebih mementingkan hasil jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang. Dalam hal ini, perusahaan mungkin mengabaikan aspek lingkungan atau sosial karena fokus utama mereka adalah pada pengurangan biaya langsung tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Green accounting memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk menilai dampak lingkungan secara keseluruhan, sementara MFCA adalah metode perhitungan yang fokus pada efisiensi material dalam proses produksi. Keduanya saling melengkapi dalam mendukung *sustainable development*. *Green accounting* membantu perusahaan memahami dan mengkomunikasikan dampak lingkungan mereka kepada pemangku kepentingan, sedangkan MFCA memberikan panduan praktis untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi dalam operasional sehari-hari. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini secara sinergis, perusahaan dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial, yang merupakan inti dari pembangunan berkelanjutan.

Bedasarkan uraian latar belakang, masih ditemukan inkonsistensi hasil penelitian terkait *sustainable development*. Oleh karena itu, penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *sustainable development* pada perusahaan sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor bahan baku yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023 masih relevan untuk dilakukan.

1.3 Rumusan Masalah

Sustainable development adalah konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Suparmoko, 2020). *Sustainability* menyeimbangkan tiga aspek utama yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung tanpa merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. *Sustainable development* juga menjadi dasar dari *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu 17 tujuan global yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan dunia, kemiskinan, perubahan iklim, dan ketimpangan sosial (Handrian & Andry, 2020). Keberadaan *green accounting* membantu perusahaan dalam menentukan strategi yang akan digunakan untuk meminimalisir biaya yang terjadi karena aktivitas perusahaan yang berdampak terhadap lingkungan. Perusahaan juga dapat menerapkan *material flow cost accounting* dalam manajemennya untuk membantu mengelola sumber daya dan limbah yang dihasilkan, karena MFCA membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan material atau bahan baku yang akan mengurangi limbah hasil produksi (Selpiyanti & Fakhroni, 2020).

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai *sustainable development* yang dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari aspek ekonomi, perusahaan sektor konsumen non primer terjadi permasalahan ketenagakerjaan dari kasus keterlambatan pembayaran upah dan pelanggaran hak buruh di PT Theodore Pan Garmino anak perusahaan PT Pan Brothers Tbk. Aspek sosial pada sektor bahan baku khususnya industri pertambangan, aktivitas tambang nikel di Maluku Utara yang dilakukan Oleh PT Trimegah Bangun Persada Tbk menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak negatif pada masyarakat adat, terutama terkait akses air bersih dan kesehatan. Sementara itu, dari sisi lingkungan, limbah plastik dari sektor konsumen primer menjadi ancaman serius, dengan hasil brand audit menunjukkan perusahaan seperti Wings, Unilever, dan Indofood sebagai penyumbang utama sampah plastik saset. Ketiga permasalahan ini berhubungan erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), seperti SDGs 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDGs 3 kehidupan sehat dan

sejahtera, dan SDGs 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan ini guna mendukung *sustainable development* di Indonesia khususnya di sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor bahan baku.

Adanya permasalahan terkait aspek dalam *sustainable development* pada perusahaan sektor konsumen primer, konsumen non primer dan sektor bahan baku, serta beberapa hasil penelitian terdahulu, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait *sustainable development* dan faktor – faktor yang mempengaruhinya, yaitu *green accounting* dan *material flow cost accounting* pada perusahaan di sektor tersebut periode 2020-2023.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa hasil deskriptif *green accounting*, *material flow cost accounting* dan *sustainable development* pada perusahaan publik sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023?
2. Apakah *green accounting* dan *material flow cost accounting* berpengaruh terhadap *sustainable development* pada perusahaan publik sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023?
3. Apakah *green accounting* berpengaruh terhadap *sustainable development* pada perusahaan publik sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023?
4. Apakah *material flow cost accounting* berpengaruh terhadap *sustainable development* pada perusahaan publik sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023?

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu:

1. Untuk mengetahui *green accounting*, *material flow cost accounting* dan *sustainable development* pada perusahaan publik sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *green accounting* dan *material flow cost accounting* terhadap *sustainable development* pada perusahaan publik sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh *green accounting* terhadap *sustainable development* pada perusahaan publik sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *material flow cost accounting* terhadap *sustainable development* pada perusahaan publik sektor konsumen primer, sektor konsumen non primer dan sektor bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

- a. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan *green accounting* dan *material flow cost accounting* terhadap pencapaian *sustainable development*, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memperdalam studi terkait strategi penerapan *green accounting* dan *material flow cost accounting* dalam mendukung *sustainable development* perusahaan, serta mengeksplorasi variabel lain yang mungkin relevan

1.5.2 Aspek Praktis

- a. Bagi investor, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih luas dalam mempertimbangkan aspek keberlanjutan perusahaan sebelum berinvestasi. Tidak hanya kinerja keuangan yang menjadi indikator, tetapi juga bagaimana perusahaan mengelola dampak lingkungan melalui penerapan *green accounting* dan efisiensi material dengan MFCA.
- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan panduan dan kontribusi pemikiran untuk mengoptimalkan penerapan *green accounting* dan MFCA dalam mendukung efisiensi biaya, mengurangi limbah produksi, dan meningkatkan pengungkapan keberlanjutan yang mendukung tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hal ini juga dapat memperkuat reputasi perusahaan di mata stakeholder global dan mewujudkan keberlanjutan jangka panjang.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai garis besar mengenai isi penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, yaitu perusahaan sektor konsumen primer yang konsisten terdaftar di BEI Periode 2020-2023. Selain itu bab ini juga menjelaskan latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dalam aspek teoritis dan praktis serta sistematika penulisan tugas akhir terkait topik penelitian.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian, yaitu *green accounting*, *material flow cost accounting*, dan *sustainable development*. Bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi, kerangka penelitian dan pembuatan hipotesis.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan penjelasan mengenai jenis penelitian, variabel operasional dengan menguraikan setiap indikator variabel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *green accounting* dan *material flow cost accounting*, sedangkan variabel dependen adalah *sustainable development*. Selain

itu bab ini juga menguraikan mengenai tahapan penelitian, metode, populasi, sampel dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian secara berurutan sesuai dengan yang ada di rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bab ini menyajikan hasil analisis data yang telah diinterpretasikan dan telah disimpulkan. Selain itu bab ini juga menyajikan hasil analisis yang telah diinterpretasikan dengan penelitian terdahulu atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan disertai dengan ringkasan hasil pengolahan data penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan mengenai saran perbaikan pada penelitian selanjutnya mengenai *sustainable development*.